

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dalam 3 periode terakhir, konsumsi akhir mengalami krisis dan perubahan kebijakan, yang mana hal itu memberikan dampak pada perekonomian yang kurang stabil terutama pada pengeluaran konsumsi. Konsumsi jika dikatakan secara individu merupakan masalah yang sederhana, namun jika sekala dari konsumsi itu banyak atau menjadi agregat maka permasalahan yang ditimbulkan akan merembet ke permasalahan ekonomi yang lebih besar. Konsep dasarnya adalah pendapatan yang diperoleh masyarakat akan diteruskan kembali untuk kegiatan konsumsi pada hidupnya. Sebagaimana disebutkan juga dalam dalil Allah SWT pada Surat An-Najm (53) 39-41 :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۚ ۝٤٠ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ ۚ ۝٤١

Artinya: Dan manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), maka ia akan dibalas dengan pahala yang paling sempurna.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta merupakan bagian dari pengeluaran konsumsi final yang merupakan salah satu variabel makroekonomi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan swasta atas barang dan jasa akhir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan bagian lainnya yaitu belanja pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004)

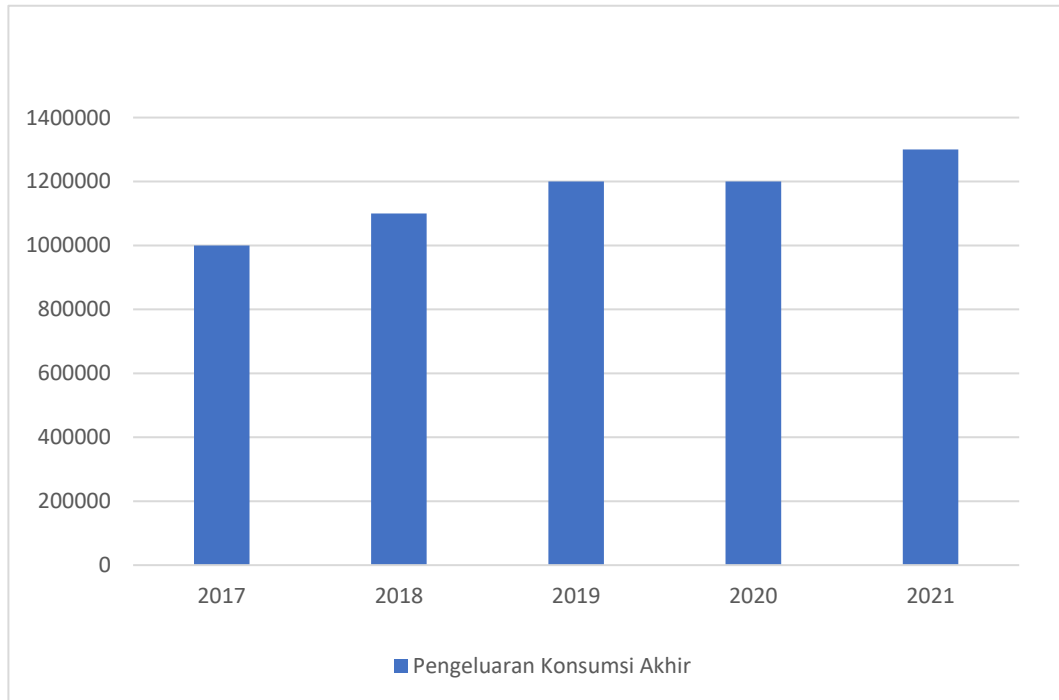
dalam (Bawinti et al., n.d. 2018) yaitu suatu gerakan pemerintah dalam mengatur berjalannya perekonomian dengan menentukan besar kecilnya pendapatan pemerintah. dan belanja yang setiap tahunnya tercermin dalam APBN Nasional dan APBD daerah. Tujuan kebijakan fiskal jelas untuk menyeimbangkan atau menstabilkan harga, tingkat output dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan penstabil pengeluaran konsumsi rumah tangga dan swasta.

Semenjak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001 secara efisien di Indonesia, kebijakan ini menimbulkan perubahan mendasar pada perekonomian khususnya konsumsi. Pada sisi pemerintah, bebasnya daerah dalam mengatur wilayahnya untuk memajukan pembangunannya menimbulkan arah konsumsi masyarakat menjadi berubah dan berkembang pesat. Terutama ketika wilayah itu berubah menjadi kawasan kota besar atau industri, pola dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, swasta serta pemerintahnya akan berubah dari pada daerah lainnya. Disisi lainnya perubahan pada meningkatnya konsumsi akan meningkatkan ketersediaan barang dan jasa itu juga, biasanya barang yang beredar dikonsumsi tidak seluruhnya merupakan produk lokal. Adanya barang impor melengkapi permintaan yang kadang merupakan ketidakmampuan produsen dalam memenuhi semua kebutuhannya sesuai pasar.

Sering kali melakukan impor menjadi jalan pintas untuk mengurangi banyak biaya daripada memproduksi sendiri, sehingga impor

menjadi pilihan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, pemerintah maupun swasta. Impor sendiri adalah barang atau yang diproduksi dari luar dan dikonsumsi oleh pengimpor untuk memenuhi kebutuhannya, namun berlebihannya impor juga akan menyebabkan penurunan pada konsumsi atau PDB di suatu negara. Meski begitu saat ini Indonesia mengubah strategi menjadi strategi diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini bergerak dari strategi pembangunan berorientasi ekspor ke permintaan domestik yang lebih tinggi, stimulasi konsumsi, dan implementasi potensi konsumen, karena swasta diharapkan “jauh lebih menonjol dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dari pada ekspor” (ESCAPE. 2016).

**Tabel 1.1 Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Bulanan Masyarakat Indonesia
2017-2021**



Sumber : Data BPS 2022

Rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan penduduk Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2021 penduduk Indonesia rata-rata mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp1,26 juta per bulan. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp38.905 atau meningkat 3,17% dari tahun 2020 yang rata-rata Rp1,22 juta per bulan.

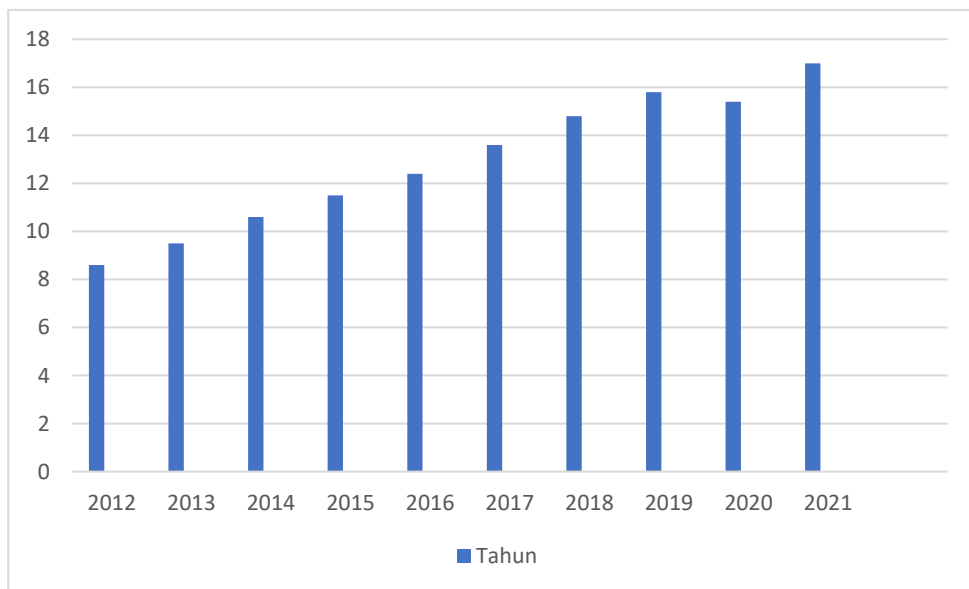
Pengeluaran konsumsi bulanan pada tahun 2021 bahkan meningkat sebesar 22% dibandingkan tahun 2017 yang rata-rata masih Rp 1,03 juta per bulan.

Jika dirinci berdasarkan pos pengeluaran, pada tahun 2021 rata-rata penduduk Indonesia mengeluarkan Rp622,8 ribu per bulan untuk konsumsi makanan, kemudian Rp641,7 ribu untuk konsumsi nonmakanan.

Berdasarkan wilayah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan sebesar Rp 1,48 juta per bulan. Lebih besar dibandingkan penduduk di pedesaan yang rata-rata konsumsinya Rp971,4 ribu per bulan.

BPS juga mencatat pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional, yakni 54,42% pada tahun 2021.

Tabel 1 1 PDB Ekonomi Indonesia (2012-2021)

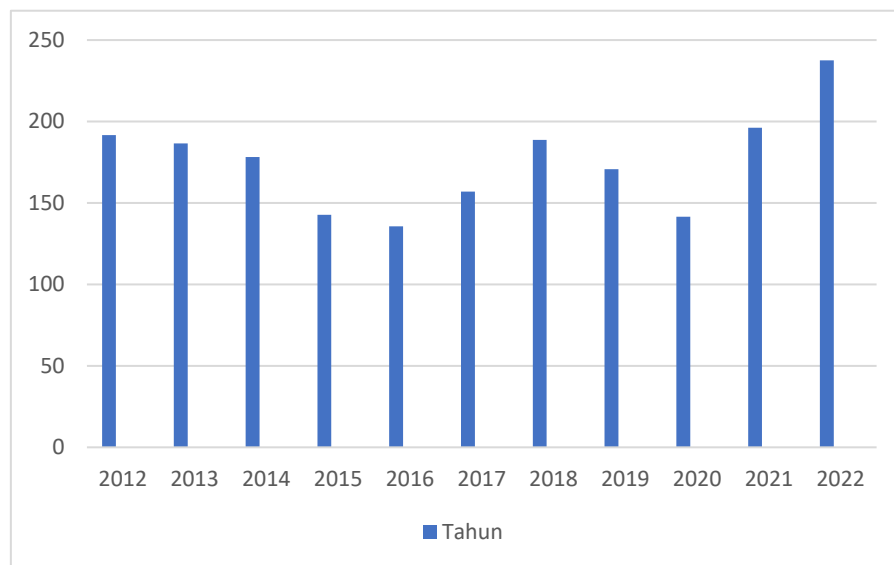


Sumber : Data BPS 2022

Produk domestik bruto (PDB) Indonesia menunjukkan tren peningkatan dalam 2 dekade terakhir. Baru pada tahun 2020, PDB Indonesia anjlok seiring pandemi Covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan PDB nasional atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp 16,97 kuadriliun atau setara US\$ 1,19 triliun (kurs Rp 14.269 per US\$) pada tahun 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hanya Rp 15,4 kuadriliun.

Tabel 1 2 Nilai Impor Tahunan Indonesia (2012-2022)



Sumber : Data BPS 2022

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai impor nasional sepanjang 2022 juga naik 21,07% (yoy) menjadi US\$237,52 miliar. Rinciannya, nilai impor migas meningkat 58,31% (yoy) ke US\$40,41 miliar, dan impor nonmigas naik 15,5% (yoy) menjadi US\$197,1 miliar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amin (2011). PDB (Produk Domestik Bruto) mempunyai pengaruh jangka panjang dan merupakan penghubung antara pengeluaran konsumsi dengan pertumbuhan ekonomi. Menurut Hidayatul Akmal (2016). Impor mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi akhir. Penelitian yang dilakukan oleh (Cholily, 2023; Meinarsari et al., 2022) yang menyatakan bahwa kebijakan otonomi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi final di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH PDB, IMPOR DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR DI INDONESIA PERIODE 1988-2021”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh PDB terhadap pengeluaran konsumsi pada akhir periode 1988-2021?
2. Apakah terdapat pengaruh antara variabel Impor terhadap pengeluaran konsumsi akhir periode 1988-2021?
3. Apakah terdapat pengaruh dari Kebijakan Otonomi Daerah terhadap pengeluaran konsumsi akhir periode 1988-2021?

C. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk variabel terikat (Y) menggunakan variabel pengeluaran konsumsi akhir.
2. Untuk variabel bebasnya terdapat 2 yaitu PDB sebagai (X1) dan Impor (X2), dan Otonomi Daerah (D) Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh PDB terhadap pengeluaran konsumsi pada akhir periode 1988-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh antara variabel Impor terhadap pengeluaran konsumsi akhir periode 1988-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Kebijakan Otonomi Daerah terhadap pengeluaran konsumsi akhir periode 1988-2021

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari dari penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan informasi utama atau tambahan tentang pengaruh PDB, Impor pangan terhadap pengeluaran konsumsi akhir, periode 1988-2021
2. Sebagai bahan referensi atau masukan bagi penelitian lebih

lanjut di ruang lingkup yang sama.

3. Memberikan informasi bagi pembaca untuk menambah wawasan pada ruang lingkup penelitian serupa.